

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan oleh penulis dalam melakukan penelitiannya. Penelitian terdahulu yang telah didapat oleh penulis dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian/Peneliti/Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya Dengan SAK-ETAP Pada UKM Medan Perjuangan. Fitriani Saragih, Surikayanti, 2015	Akuntansi, SAK ETAP, dan UKM	Penerapan akuntansi yang dilakukan peaku UKM di Jalan Seram belum sesuai dengan SAK ETAP. Hal tersebut karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai SAK ETAP serta tidak adanya sosialisasi ataupun pelatihan dari pihak pemerintah maupun lembaga yang membawahi UKM masih kurang maksimal, sehingga pelaku UKM belum memahami pentingnya SAK ETAP bagi usahanya.
2	Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Sak Emkm di Surabaya. Nanang Shonhadji, Laely Aghe A., dan Djuwito, 2017.	SAK EMKM dan UMKM	Usaha jasa laundry mitra memiliki pencatatan keuangan sebatas pada pemasukan dan pengeluaran laundry, sehingga penerapan akuntansi berdasarkan pencatatan transaksi dan laporan keuangan yang berdasarkan SAK EMKM pada usaha jasa laundry masih sangat lemah.
3	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada	Sak-Etap dan UMKM	Pemahaman perajin mebel tentang SAK-ETAP masih rendah, pencatatan keuangan yang mereka lakukan hanya sebatas laporan bisnis yang dibuat berdasar dengan pemahaman dan

dilanjutkan

lanjutan

	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. Arri Alfitri, Ngadimin dan Sohidin, 2014.		kebutuhan perajin mebel. Perajin mebel tidak menggunakan SAK-ETAP dalam membuat laporan keuangan, karena mereka tidak paham tentang SAK-ETAP.
4	Evaluasi Penyusunan Laporan laba Rugi dan Neraca Berdasar SAK-ETAP pada PT Karunia Multiguna Abadi. Ribka Agustine Singal Dan Sherly Pinatik., 2015.	Laporan keuangan dan SAK ETAP	Laporan neraca dan laba rugi yang disajikan oleh PT.Karunia Multiguna Abadi pada bulan September tahun 2015 belum sesuai dengan SAK ETAP dan masih ada beberapa pos akun yang belum disajikan, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang dimiliki.
5	Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) dan Penyusunan Laporan Keuangan Auditan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Umkm). Nedsal Sixpria, Titi Suhartati, dan Sabar Warsini, 2012	Sak-Etap dan UMKM	Rendahnya praktik akuntansi di Indonesia membuat kurang optimalnya pemanfaat informasi akuntansi untuk mengembangkan UMKM. Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor, yaitu persepsi terhadap pentingnya keberadaan informasi akuntansi bagi UMKM, pengetahuan akuntansi pemilik/staf UMKM, pertimbangan biaya-manfaat bagi UMKM dan ukuran UMKM.
6	Accounting Practices of Smes: A Case Study of Kumasi Metropolis In Ghana. Gilbert Kwabena Amoako, 2013.	Akuntansi dan UKM	Sebagian besar UKM gagal mempertahankan catatan akuntansi lengkap karena para pelaku UKM berpikir tidak perlu untuk melakukan pencatatan untuk usahanya.
7	Implementation of Accounting Standard On Small and Medium-Sized Entities (Smes).	UKM dan SAK ETAP	Hanya sebagian kecil UKM yang menggunakan SAK-ETAP sebagai acuan untuk dalam menyusun laporan keuangan. Kebanyakan dari mereka hanya mengidentifikasi transaksi dan mencatat pendapatan. Hal tersebut

dilanjutkan

	Hendrian dan Rini Dwiyani Hadiwidjaja, 2016.		terjadi karena kurangnya pengetahuan mereka tentang SAK-ETAP dan kurangnya kompetensi staf akuntansi yang mereka miliki.
--	--	--	--

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini meneliti tentang penerapan SAK ETAP pada UMKM seperti yang dilakukan oleh Alfitri, A (2014) . Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini juga menambahkan tentang peran SAK ETAP dalam menunjang kinerja keuangan UMKM. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Alfitri, A. (2014), terletak pada obyek penelitiannya. Pada penelitian Alfitri, A. (2014), obyek yang diteliti yaitu perajin mebel di Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring, sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini yaitu perajin manik-manik di Desa Gambang Kecamatan Gudo.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

#### **2.2.1.1. Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Definisi UMKM diatur dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

#### **2.2.1.2. Kriteria UMKM**

Pemerintah memberikan batasan berdasarkan undang-undang sesuai dengan kriteria jenis usaha, untuk membedakan sebuah bisnis apakah suatu bisnis tersebut masuk kedalam kategori usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah. Kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih, selain tanah dan bangunan tempat usaha, maksimal Rp 50.000.000, 00

- b. Memperoleh hasil penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000,00.
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- a. Kekayaan bersih usaha kecil antara Rp50.000.000,00 - Rp500.000.000,00 selain tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  - b. Hasil penjualan tahunannya minimal Rp300.000.000,00 dan maksimal Rp2.500.000.000,00.
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih minimal Rp500.000.000,00 - Rp10.000.000.000,00 selain tanah dan bangunan; atau
  - b. Mendapat hasil penjualan tahunan Rp2.500.000.000,00 - Rp50.000.000.000,00.

Menurut Sofiah, dkk (2011) dalam Fitriani dan Surikayanti (2015), secara umum sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Pembukuannya relatif sederhana dan kebanyakan tidak mengikuti standar pembukuan yang ada.
- b. Margin laba yang cenderung tipis karena tingginya persaingan.
- c. Modal terbatas
- d. Kurangnya pengalaman dalam mengelola perusahaan.
- e. Kecilnya skala ekonomi, sehingga biaya produksi kurang efisien.

- f. Terbatasnya kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar.
- g. Rendahnya akses untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal, karena sistem administrasi yang terbatas.

### **2.2.1.3. Masalah Pengembangan UMKM**

Peran UMKM bagi perekonomian suatu negara khususnya Negara Indonesia sangatlah penting. Secara umum, UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga jumlah pengangguran menjadi berkurang. Namun, dalam pengembangannya pelaku UMKM tidak terlepas dari berbagai permasalahan.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu membentuk badan yang bertugas untuk mengatur dan mengatasi permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM. Pihak atau instansi pemerintah yang telah berperan dalam pengembangan UMKM di Indonesia antara lain: Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementrian Negara KUKM), Departemen Keuangan (Depkeu), Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperdag), dan Bank Indonesia (BI).

Meski pemerintah telah berupaya untuk mengembangkan UMKM, tetap saja pelaku UMKM kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Urata (dalam Hapsari, I.M, 2014), menjelaskan bahwa pelaku UMKM dihadapkan

oleh dua masalah utama, yaitu masalah finansial serta masalah non finansial.

Masalah finansial yang dihadapi oleh UMKM terdiri dari:

- a. Kurangnya kesesuaian antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh pelaku UMKM.
- b. Lemahnya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM
- c. Tingginya biaya transaksi karena prosedur kredit yang cukup rumit.
- d. Akses ke sumber dana formal masih terbatas.
- e. Tingginya bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja.
- f. Banyak pelaku UMKM yang belum *bankable*, baik disebabkan karena belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial finansial.

Sedangkan masalah non-finansial yang dialami oleh pelaku UMKM antara lain:

- a. Lemahnya pengetahuan terhadap teknologi produksi dan *quality control*.
- b. Kurangnya pengetahuan tentang pemasaran.
- c. Terbatasnya sumber daya manusia.
- d. Pengetahuan mengenai keuangan dan akuntansi masih lemah.

### **2.2.2. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan mengikhtisarkan data transaksi dalam bentuk yang berguna dalam pengambilan keputusan (Pura, 2012:11). Komponen laporan

keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, dan catatan atas laporan keuangan. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015)

Laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi mengenai keadaan keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi pengguna untuk mengambil keputusan ekonomi. Pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut meliputi pihak yang menyediakan sumber daya bagi suatu entitas seperti kreditor maupun investor. Selain itu, laporan keuangan juga dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak yang menyediakan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015)

### **2.2.3. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**

SAK ETAP merupakan suatu standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang dibuat untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi eksternal. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).

Menurut IAI dalam SAK ETAP laporan keuangan entitas yang lengkap terdiri dari: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan



arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### **2.2.3.1. Neraca**

Neraca merupakan laporan keuangan yang dapat mencerminkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode (Pura, 2012:89). Neraca merupakan laporan keuangan yang menjelaskan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

Neraca dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk *scontro* (bentuk T) dan bentuk *stafel* (bentuk laporan). Dalam bentuk *scontro*, laporan posisi keuangan terdiri dari dua sisi, yaitu sisi kiri (berisi aset) dan sisi kanan (berisi kewajiban dan ekuitas). Sedangkan dalam bentuk *stafel*, aset, kewajiban, dan ekuitas disusun secara berurutan dari atas ke bawah. Aset dilaporkan terlebih dahulu dan diakhiri dengan ekuitas (Pura, 2012:90).

Neraca berisi aset, kewajiban serta ekuitas yang dimiliki oleh entitas. Akun-akun yang tercantum dalam neraca menurut SAK ETAP minimal terdiri dari: kas dan setara kas, piutang, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang, kewajiban pajak, dan ekuitas.

Aset diakui jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa yang akan datang dapat mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak dapat dinikmati setelah periode

pelaporan berjalan. Sedangkan kewajiban diakui jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlahnya dapat diukur dengan andal.

#### **2.2.3.2. Laporan Laba Rugi**

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan atau entitas untuk mendapatkan keuntungan selama suatu periode tertentu. Laporan laba rugi dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan atau entitas, apakah mengalami kemajuan (mendapat keuntungan) atau mengalami kebangkrutan (menderita kerugian) (Pura, 2012:88).

Laporan laba rugi berisi pos-pos pendapatan, beban keuangan, beban pajak, serta laba rugi neto. Semua akun penghasilan dan beban dalam satu periode dimasukkan dalam laporan laba rugi, kecuali yang dinyatakan lain dalam SAK ETAP. SAK ETAP juga mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode sebelumnya dan bukan bagian dari laba atau rugi periode terjadinya perubahan.

Penghasilan diakui ketika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan kenaikan manfaat tersebut dapat diukur dengan andal. Sedangkan beban diakui jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang

berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

#### **2.2.3.3. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan yang terjadi pada laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, dan jumlah investasi selama periode tersebut.

#### **2.2.3.4. Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode tertentu. Laporan arus kas diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Arus kas dari aktivitas operasi umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa serta kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Misalnya penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa atau pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. Aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Aktivitas tersebut contohnya, penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Sedangkan dari aktivitas pendanaan contohnya

yaitu penerimaan kas dari penerbitan pinjaman atau penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain.

#### **2.2.3.5. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan diperlukan oleh suatu perusahaan atau entitas untuk memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif dan dilaporkan dalam bentuk narasi. Catatan atas laporan keuangan dibuat untuk menjelaskan atau menggambarkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan.

Menurut SAK ETAP, catatan atas laporan keuangan berisi:

- a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SAK ETAP.
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi.
- c. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut .
- d. Pengungkapan lain.

#### **2.2.4. Kinerja**

Suyudi (1999) dalam Ardiana, dkk (2010) menjelaskan bahwa, kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi atau entitas tertentu, berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi atau entitas

tersebut. Apabila kinerja individu baik, maka besar kemungkinan kinerja perusahaan atau organisasi juga akan baik.

Parameter untuk mengukur kinerja atau keberhasilan bisnis menurut Gitosudarmo (2001) dalam Ratnawati dan Hikmah (2001) adalah sebagai berikut:

- a. Besar kecilnya penghasilan atau keuntungan yang diperoleh
- b. Tingkat pertumbuhan bisnis yang semakin pesat (*rate of growth*)
- c. Posisi persaingan terus meningkat (*Competitive advantage*)
- d. Semakin meningkatnya posisi bisnis (kemandirian bisnis)
- e. Semakin bagusnya *image* terhadap perusahaan (*Corporate image*)

### **2.3. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual menunjukkan langkah apa saja yang akan dilakukan penulis dalam penelitiannya. Langkah pertama yang dilakukan yaitu penulis memilih UMKM yang digunakan sebagai objek penelitian. Selanjutnya, penulis melakukan survei lapangan untuk mengetahui penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Penerapan akuntansi dapat diketahui dari laporan keuangan yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Dari laporan keuangan tersebut, penulis melakukan evaluasi apakah laporan keuangan tersebut sesuai dengan SAK ETAP. Setelah dievaluasi, langkah selanjutnya yaitu mencari tahu tentang permasalahan apa saja yang dialami oleh pelaku UMKM dalam menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya. Langkah terakhir yaitu

menganalisis bagaimanakah peran SAK ETAP dalam menunjang kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Gudo. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Kerangka Konseptual

